



“Seafood not Slavefood”: Advokasi Aktivisme Transnasional untuk Mengakhiri Praktik Perbudakan Modern di Industri Perikanan Thailand

Roihanatul Maziyah

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269 Website
<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip.undip.ac.id

ABSTRACT

In 2013, EJF (Environmental Justice Foundation) launched a global campaign named "Seafood not Slavefood," intended to end modern slavery practices in Thai fishing industry. EJF advocacy efforts succeeded in pressuring the Thai government to ratify the Forced Labor Protocol and ILO Work in Fishing Convention. Hence this study aims to shed light on the EJF's strategy in advocating modern slavery plights that occur in the Thai fishing industry. This study attempts to advance transnationalism by analyzing the role of non-state actors in determining state behavior. This study utilizes the concept of transnational advocacy networks from Keck and Sikkink which carried out within qualitative research methods and literature studies as data collection techniques. This research argues that the boomerang pattern has implication in shaping Thailand's behavior and its policy. In achieving state policy change from targeted actor, EJF used four strategies, mainly information politics, symbolic politics, leverage politics, and accountability politics.

Keywords: *Transnational Advocacy Networks, Modern Slavery, Fishing Industry, Thailand, Environmental Justice Foundation.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran jaringan advokasi transnasional dalam mengadvokasikan praktik perbudakan modern yang terjadi di industri perikanan Thailand. Sektor perikanan menjadi salah satu elemen penting dalam menopang perekonomian Thailand. Hal ini dibuktikan dengan kontribusi sektor perikanan yang mencapai 10 persen dari total pendapatan negara dengan nilai ekspor mencapai 6,6 juta USD pada tahun 2014, selain itu Thailand juga merupakan negara eksportir *seafood* terbesar ketiga di dunia (The Guardian, 2015; U.S. Department of Agriculture, 2018)). Sektor yang lukratif ini ternyata tidak diimbangi dengan terjaminnya hak-hak pekerja. Laporan independen dari *Non-Governmental Organization* (NGO) seperti Human Rights Watch dan Environmental Justice Foundation (EJF) mendokumentasikan serangkaian praktik perbudakan modern yang menimpa pekerja migran yang mayoritas berasal dari Kamboja, Myanmar, dan Laos ((EJF, 2013a, 2013b, 2013c, 2014, 2015a, 2015b; Human Rights Watch, 2018). Bentuk-bentuk perbudakan modern diantaranya praktik jeratan utang (*bonded labor*), kerja paksa, ancaman kekerasan fisik bahkan

pembunuhan.

EJF (2015a, 2015b) mengungkapkan kegagalan pemerintah Thailand dalam memenuhi standar minimum bagi pekerja di sektor perikanan. Karena respon pemerintah Thailand yang tidak memadai terhadap korban perbudakan modern, kelompok advokasi mengambil isu tersebut ke dalam domain kerja mereka, terlebih lagi kasus perbudakan modern yang terjadi dalam industri perikanan Thailand ini memiliki sifat transnasional yaitu adanya pekerja migran dan indikasi praktik perbudakan yang merupakan isu global. Maka tidak mengherankan apabila kelompok-kelompok advokasi yang terdiri dari aktor-aktor non-negara membangun konsolidasi gerakan kolektif yang melewati batas-batas negara imajiner. Salah satu gerakan kolektif yang terbentuk bernama “*Seafood not Slavefood*” yang dipelopori oleh EJF, sebuah NGO internasional yang berbasis di London, Inggris. Gerakan tersebut merupakan kampanye global yang bertujuan untuk mengakhiri praktik perbudakan modern di industri perikanan Thailand.

Kampanye global “*Seafood not Slavefood*” pertama kali dilakukan pada tahun 2013, diawali dengan kerjasama EJF dengan NGO lokal Thailand bernama Labour Rights Protection Network (LPN) untuk melaksanakan investigasi bersama. Investigasi tersebut menjadi momentum bagi keberlanjutan perlawanan terhadap praktik perbudakan modern. Hal ini dibuktikan dengan serangkaian publikasi media internasional seperti dari The Guardian, Associated Press, dan New York Times yang menyoroti praktik perbudakan modern dalam rantai pasokan *seafood* global. Selain itu, publikasi hasil investigasi EJF juga mendorong negara-negara yang menjadi tujuan ekspor utama produk perikanan Thailand seperti Inggris, Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk menentukan sikap melalui tekanan bilateral kepada pemerintah Thailand. Akibat adanya tekanan global baik dari aktor negara maupun non-negara, Thailand sebagai aktor target kemudian bersedia untuk meratifikasi *Protocol amending Forced Labour Convention* dan *ILO Work on Fishing Convention 2007*, masing-masing pada tahun 2018 dan 2019 (Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, 2018, 2019). Dikeluarkannya kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran jaringan advokasi transnasional sebagai kelompok penekan dalam mengubah arah kebijakan Thailand di sektor ketenagakerjaan dan industri perikanan.

Penelitian ini akan berfokus pada peran EJF dalam mengadvokasikan kasus perbudakan modern di industri perikanan Thailand. Penulis memilih EJF sebagai fokus penelitian dikarenakan oleh dua alasan. Yang pertama, dalam beberapa tulisan akademik (lihat Bush et al., 2018; Marschke & Vandergeest, 2016; Vandergeest, Tran, & Marschke, 2017) menyebutkan kampanye “*Seafood not Slavefood*” EJF menjadi jalan pembuka bagi hadirnya atensi internasional terhadap kasus perbudakan modern. Yang kedua, hasil investigasi EJF digunakan sebagai salah satu pertimbangan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat untuk menjatuhkan ‘sanksi’ bagi Thailand agar memperbaiki sektor perikanan dan mengakhiri praktik perbudakan modern yang terjadi didalamnya.

Penelitian ini berargumen bahwa EJF memiliki peran penting dalam menekan pemerintah Thailand untuk mengakhiri praktik perbudakan modern yang terjadi di industri perikananannya. Dalam menekan aktor target, EJF sebagai bagian dari jaringan advokasi transnasional melakukan serangkaian strategi yang terstruktur dan terencana melalui strategi politik informasi, politik simbolik, politik pengaruh, dan politik akuntabilitas.

PEMBAHASAN

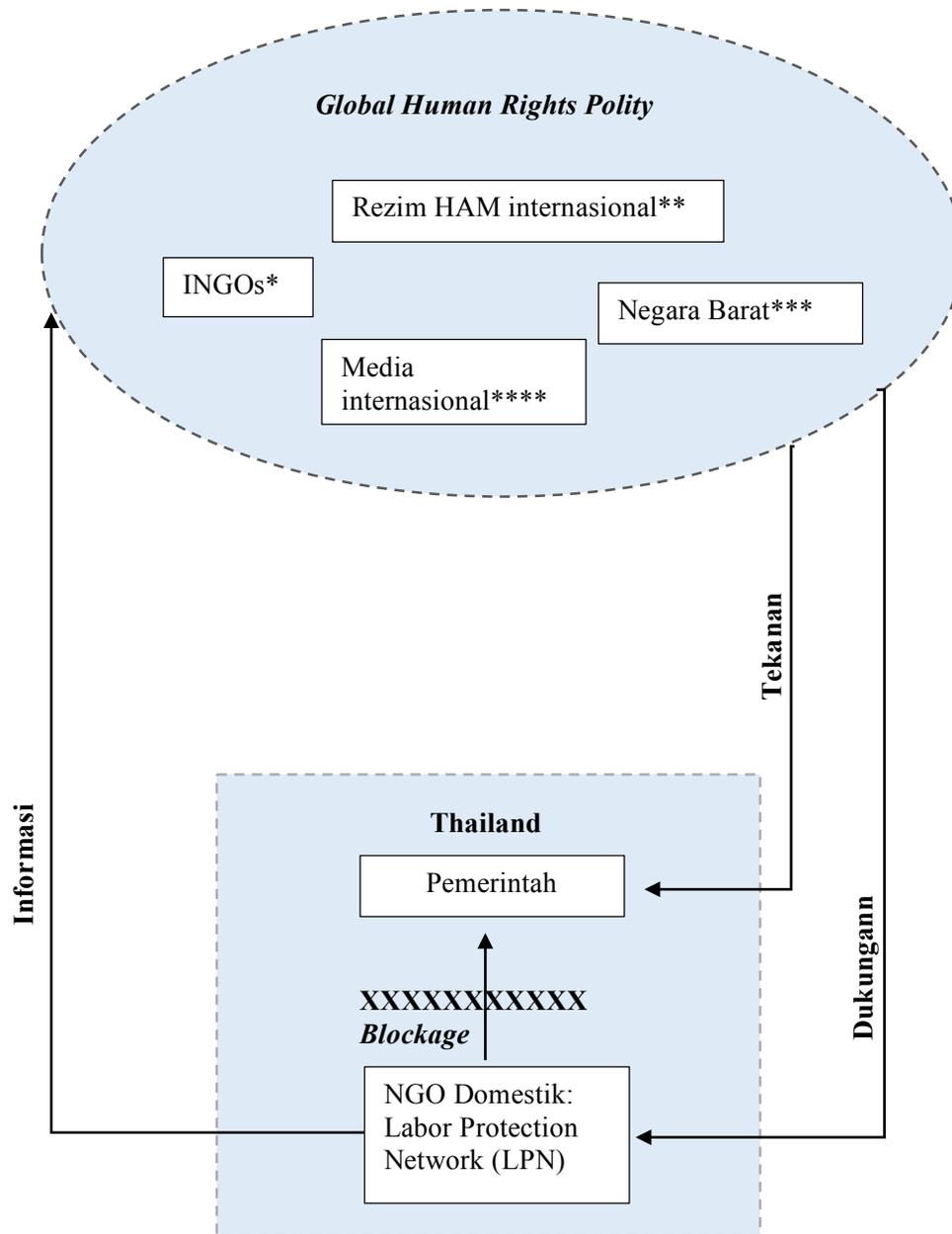
Pola Bumerang: Setiap Hambatan selalu disertai dengan Jalan Keluar

Konsep jaringan advokasi transnasional dikembangkan oleh Keck dan Sikkink (1998, hal.11) yang merujuk pada kumpulan aktor yang diikat oleh *shared values* dan *common discourse* yang memanfaatkan kanal-kanal interaksi untuk bekerja melampaui batas-batas negara dalam mengadvokasikan suatu isu global seperti hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan. Kemunculan jaringan ini dipengaruhi oleh konteks politik domestik negara target, yakni ketika suatu negara membatasi gerakan domestik yang menuntut perubahan (*blockage*), karenanya gerakan tersebut kemudian mencari jalan lain dengan menjalin relasi dengan aktor-aktor yang tergabung dalam masyarakat sipil global seperti NGO internasional dan media internasional. Tujuannya untuk menggalang kekuatan sehingga mampu memberikan serangan balik kepada negara target. Kondisi tersebut kemudian memunculkan istilah *boomerang pattern*. Cara kerja *boomerang pattern* dalam kasus perbudakan modern di industri perikanan Thailand dapat dilihat pada ***gambar 1***.

Boomerang pattern yang terbentuk diawali oleh advokasi NGO domestik bernama Labor Protection Network (LPN), didirikan pada tahun 2004 oleh dua aktivis HAM bernama Sampong Srakaew dan Patima Tungpuchayakul. Namun upaya advokasi mereka mendapat limitasi dari pemerintah Thailand. Limitasi seringkali terjadi di negara yang kurang demokratis. Dalam negara yang kurang demokratis, aspirasi masyarakat ‘dikerdilkan’, pelanggaran HAM terjadi secara masif yang terkadang didukung oleh negara, dan lembaga legislatif hanya berfungsi sebagai ‘tukang cap stempel’ pemerintah (Newton & Van Deth, 2009). Pada tahun 2013, berdasarkan indeks demokrasi yang dikeluarkan oleh Freedom House, Thailand dikategorikan sebagai negara *partly free*, artinya berada di antara negara yang tidak demokratis dan negara demokratis (Freedom House, 2013). Peringkat ini terus menurun setelah adanya kudeta militer pada tahun 2014 yang menempatkan Thailand sebagai negara *not free*, dengan kata lain tidak demokratis (Freedom House, 2015). Kondisi ini tentunya menghambat ruang kelompok advokasi lokal yang menyuarakan hak-hak kelompok masyarakat rentan yang termarjinalkan. Bukti limitasi yang dilakukan oleh pemerintah Thailand dapat dilihat melalui laporan EJF berjudul “*Slavery at Sea*” pada tahun 2014. Otoritas Thailand yang berhasil diwawancarai oleh EJF mengatakan “*if all trafficked workers were rescued, there would not be enough left on the boats, without workers, bussiness would be affected and export would be reduced*” (EJF, 2014). Dari pernyataan tersebut pemerintah Thailand lebih memihak kepada kepentingan ekonomi dibandingkan dengan mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi didalamnya.

Adanya hambatan yang terjadi antara pemerintah dengan kelompok masyarakat domestik kemudian mendorong LPN untuk menekan pemerintah dengan cara menghimpun kekuatan dari luar, salah satunya dengan EJF. Tujuannya tidak lain adalah dengan memberikan serangan balik (*boomerang*) kepada aktor target yaitu Thailand. Relasi antara EJF dan LPN dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh organisasi Maritime Executive dengan Patima Tungpuchayakul, “*I made contact with Steve Trent from the*

London-based Environmental Justice Foundation after he made comments full of candour and marked by palpable frustration to The Guardian... .” (Maritime Executive, 2018). Atas tawaran LPN, EJF kemudian mengadakan investigasi pada tahun 2013 yang kemudian dipublikasikan dalam laporan berjudul “*Sold to the Sea*”.



Gambar 1. *Boomerang Pattern* Praktik Perbudakan Modern di Industri Perikanan Thailand

*Catatan: telah diolah kembali
Sumber: Keck dan Sikkink (1998) dan Risse (2017)*

Keterangan:

*INGOs terdiri dari: CSO Coalition for Ethical and Sustainable Seafood, **Environmental Justice Foundation (EJF)**, (daftar selengkapnya dapat dilihat pada <https://ejfoundation.org/reports/joint-open-letter-on-the-preservation-of-fisheries-regulations>.)

** Rezim internasional: ILO Work in Fishing Convention, Protocol Amending Forced Labor Convention

***Negara Barat: Amerika Serikat, Uni Eropa

****Media internasional: The Guardian, Associated Press

Berdasarkan ilustrasi *boomerang pattern* pada gambar 1, keberadaan institusi internasional yang meregulasi norma HAM seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), rezim HAM internasional, kelompok jaringan advokasi transnasional yang terdiri dari NGO internasional, pemerintah negara-negara barat yang selama ini dikenal sebagai *norm-promoting agents*, dan media internasional yang aktif memberitakan pelanggaran HAM membentuk sebuah struktur global yang diberi nama *global human rights polity* (Risse, Ropp, & Sikkink, 1999, hal. 33). Keseluruhan entitas tersebut memiliki pemahaman kolektif akan norma HAM, secara sepsifik yang berkaitan dengan norma antiperbudakan modern.

Dalam *global human rights polity*, NGO internasional berperan penting. Eleanore Roosevelt (dalam Murdie, 2014) menyatakan NGO dapat menjadikan norma HAM internasional tidak semata-mata berada dalam tataran *das sollen* melainkan juga dapat bertransformasi menjadi *das sein*. Karenanya, EJF mempublikasikan serangkaian laporan investigasi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 agar didengar oleh aktor global lainnya sehingga dapat turut serta menekan pemerintah Thailand untuk mengadakan perubahan kebijakan di sektor perikanan dan ketenagakerjaan. Keseluruhan publikasi EJF ditampilkan dalam *tabel 1*.

Tabel 1. Publikasi EJF (Tahun 2013-2015)

Tahun	Judul	Pembahasan
2013	Sold to the Sea	Keterkaitan antara <i>labor-intensive industry</i> dengan perdagangan manusia.
2013	The Hidden Cost	Pelanggaran HAM yang dialami pekerja di industri pengolahan udang Thailand
2014	Slavery at Sea	Penyebab terjadinya perbudakan di Thailand
2015	Pirates and Slaves	Keterkaitan antara <i>overfishing</i> , degradasi lingkungan, <i>IUU Fishing</i> , dan perbudakan modern
2015	Thailand's Seafood Slaves	Perdagangan manusia dan praktik perbudakan modern di industri perikanan yang terletak di kota pelabuhan Kantang, provinsi Trang, Thailand

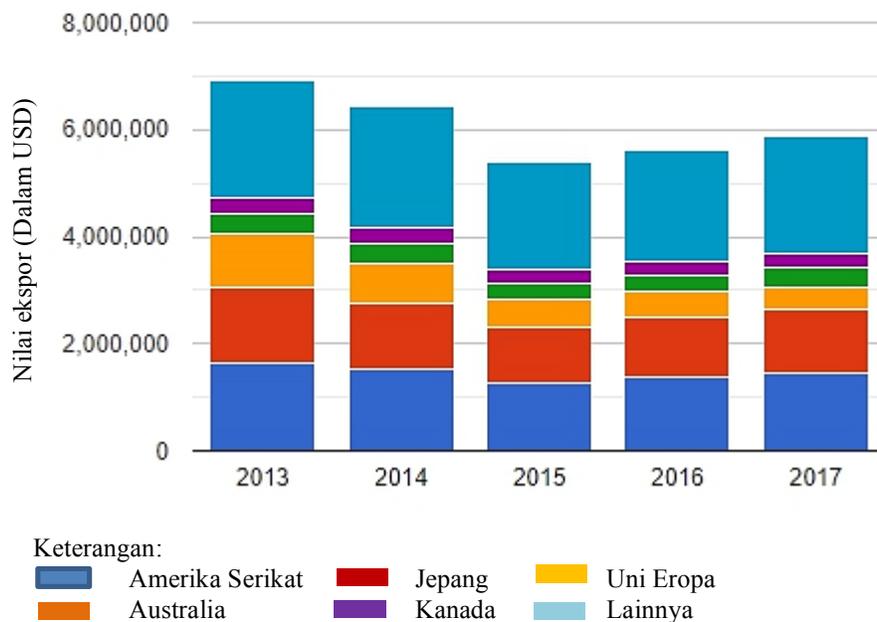
Sumber: (EJF, 2013a, 2013b, 2014, 2015a, 2015b)

Hasil investigasi oleh EJF di atas digunakan oleh media internasional seperti The Guardian dan Associated Press sebagai dasar dari pemberitaan mereka, hal tersebut tentunya membantu menggemakan misi advokasi yang dijalankan oleh LPN dan EJF. Pada tahun 2014, The Guardian merupakan media internasional pertama yang mengangkat kasus perbudakan di industri perikanan Thailand dengan judul “*Trafficked into slavery on Thai trawlers to catch food for prawns*” (The Guardian, 2014). Wartawan yang menulis berita tersebut bernama Kate Hondal dan Chris Kelly memiliki asosiasi dengan organisasi Humanity United. Kemudian pada akhir 2015, Associated Press melakukan investigasi yang mendalam untuk menguak praktik perbudakan modern di industri perikanan Thailand dengan judul “*Are Slave Catching the Fish you Buy?*” (MacDowell, Mason, & Mendoza, 2015). Hasil dari investigasi tersebut merupakan buah kerja sama antara AP dengan LPN yang selanjutnya dipublikasikan oleh AP melalui film dokumenter, media online, maupun media cetak. Kerja keras AP dan LPN dalam memerangi praktik perbudakan modern melalui ‘pena’ berhasil meraih penghargaan Pulitzer

pada tahun 2016 di bidang pelayanan publik (LPN, 2019). Patima Tungpuchayakul sebagai perwakilan dari organisasi LPN mengatakan film dokumenter ini memberikan bukti visual bahwa terdapat praktik kerja paksa di industri perikanan Thailand yang lukratif (Wright, 2019).

Kampanye global yang dilakukan oleh EJF ditambah dengan pemberitaan oleh media internasional mendorong negara-negara yang menjadi tujuan ekspor produk perikanan Thailand kemudian mengeluarkan keputusan yang merefleksikan kecaman terhadap praktik perbudakan modern yang terjadi didalamnya. Data negara yang menjadi tujuan ekspor produk perikanan Thailand dapat dilihat pada **gambar 2**.

Gambar 2. Total Ekspor Sektor Perikanan Thailand (2013-2017)



Sumber: *Seafood Trade Intelligence Portal (2018)*

Berdasarkan data dari gambar 2., Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa menduduki peringkat tiga teratas sebagai tujuan ekspor produk perikanan Thailand. Menanggapi praktik perbudakan modern di industri perikanan Thailand, Amerika Serikat selaku mitra dagang *seafood* terbesarnya menurunkan peringkat Thailand menjadi *Tier 3* (peringkat terendah) dalam laporan tahunan *Trafficking in Persons* (TIP) pada akhir tahun 2014, hal ini menempatkan Thailand bersama dengan negara-negara seperti Somalia dan Korea Utara yang dikenal dengan rekam jejak HAM yang buruk. Menyusul respon dari Amerika Serikat, Uni Eropa melalui *European Commission* memberikan ‘kartu kuning’ kepada Thailand karena dinilai melanggar *Council Regulation No. 1005/2008* tentang *IUU Fishing* (EJF, 2016). Keputusan oleh Komisi Uni Eropa tersebut menyusul hasil investigasi dari EJF yang menguak pelanggaran HAM serta praktik ‘*pirate fishing*’ yang terjadi dalam industri perikanan Thailand. Kedua respon baik dari Amerika Serikat maupun dari Uni Eropa memungkinkan dijatuhkannya sanksi perdagangan terhadap produk *seafood* Thailand (Stringer, Chantavanich, Laodumrongchai, & Stringer, 2018).

Thailand sebagai subjek utama ‘*yellow card*’ (Uni Eropa) dan ‘*Tier 3*’ (Amerika Serikat)

tentunya bereaksi. Terlebih lagi, pemberitaan oleh media internasional dan investigasi oleh NGO seperti EJF menimbulkan citra buruk bagi sektor perikanan Thailand yang kemudian diasosiasikan sebagai sektor paling abusif dan destruktif di dunia. Upaya advokasi dari EJF kemudian membuahkan hasil pada tanggal 30 Januari 2019 ketika pemerintah Thailand meratifikasi Konvensi ILO No.188 dan menjadi negara di Asia pertama yang berkomitmen untuk terikat pada Konvensi tersebut. (Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, 2019). Sebelumnya Thailand juga telah meratifikasi *Protocol amending Forced Labor Convention* pada 4 Juni 2018. Ratifikasi ini merefleksikan komitmen Thailand terhadap pencegahan, penghapusan kerja paksa, perlindungan dan pemulihan para korban kerja paksa di Thailand (Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, 2018).

Diratifikasinya Konvensi ILO No.188 atau *Work in Fishing Convention* dan *Protocol amending Forced Labor Convention* merupakan bukti keberhasilan dari serangkaian upaya advokasi dan kampanye yang dilakukan oleh aktor-aktor TAN, salah satunya adalah EJF. Padahal sebelumnya, pemerintah Thailand tidak memiliki komitmen dari segi legal untuk melindungi pekerja di sektor perikanan yang sebagian besar merupakan pekerja migran, sebagaimana diungkapkan oleh Patima Tungpuchayakul, salah satu pendiri organisasi LPN (dalam Wright, 2019), “... *We started with zero laws to protect fishermen*”. EJF pun sebelumnya menyatakan bahwa hukum perlindungan tenaga kerja di Thailand terutama di sektor perikanan dikeluarkan lebih dari 70 tahun yang lalu (EJF, 2013b), karenanya sangat tepat apabila mengatakan produk legislasi tersebut ‘*outdated*’ atau usang sehingga perlu pembaharuan melalui peratifikasian instrumen internasional terkait, mengingat praktik perbudakan pada dewasa ini berkembang menjadi situasi yang kompleks dan tentunya menuntut respon baru sebagai bentuk dari kehadiran negara.

Keberhasilan EJF dalam melakukan advokasi perbudakan modern yang terjadi di sektor perikanan Thailand tentunya didasarkan oleh strategi-strategi yang terencana dan sistematis, meliputi strategi politik informasi, politik simbolik, politik pengaruh, dan politik akuntabilitas.

Politik Informasi

Strategi pertama yang digunakan oleh EJF adalah politik informasi, strategi ini merujuk pada kemampuan yang dimiliki oleh aktor internasional (non-tradisional) dalam memperoleh data yang baru (belum tersentuh) kemudian mengemasnya, dan mendiseminasikannya secara global untuk meningkatkan daya tawarnya. Dalam mengejawantahkan strategi ini, EJF mengadakan perjalanan ke provinsi Kantang Thailand untuk melakukan wawancara kepada 14 korban (semuanya berkewarganegaraan Myanmar) perbudakan kapal penangkap ikan Thailand yang berhasil diselamatkan oleh *Thailand’s Department of Special Investigation* dan *The Royal Thai Police*. EJF mengadakan perjalanan ke lokus kejadian agar dapat memperoleh informasi kategori *first-hand*. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, EJF memperoleh informasi bahwa mereka (korban) bekerja di bawah perusahaan bernama Boonlarp Fishing Limited Partnership, salah satu di antara korban masih berusia di bawah umur yaitu 16, hal ini tentunya merupakan pelanggaran terhadap *Convention on the Rights of the Child* dan instrumen HAM internasional lainnya. EJF juga mendapatkan informasi berupa pola rekrutmen (melibatkan *debt bondage* dan penipuan) yang dialami oleh para penyintas sebelum akhirnya terjebak dalam praktik brutal perbudakan modern, perlakuan brutal yang mereka terima layaknya seorang budak seperti penyiksaan baik secara fisik maupun verbal, pengurungan, bahkan pemaksaan untuk mengonsumsi jenis narkoba metamfetamin. Keseluruhan dari hasil interview tersebut dikomunikasikan dalam laporan EJF berjudul “*Sold to the Sea*” (EJF, 2013b). Secara total EJF menghabiskan waktu selama tiga tahun, terhitung pada akhir tahun 2012 hingga 2015 dan berhasil

mendokumentasikan pelanggaran serius terhadap pekerja di sektor perikanan Thailand.

Hasil investigasi yang mendalam harus didiseminasikan dengan baik agar menjangkau masyarakat secara luas. Keck dan Sikkink (1999) mengungkapkan pentingnya peran media sebagai mitra dalam politik informasi jaringan. Keck dan Sikkink (1999) menambahkan, untuk menarik perhatian media internasional terutama yang memiliki pengaruh, jaringan advokasi transnasional yang terbentuk perlu memiliki “...*Sympathetic journalists may become part of the network, but more often network activists cultivate a reputation for credibility with the press, and package their information in a timely and dramatic way to draw press attention*”. Berdasarkan pernyataan dari Keck dan Sikkink tersebut, terdapat tiga benang merah bagi kelompok advokasi transnasional agar mendapat perhatian dari media internasional yaitu memiliki hubungan dengan jurnalis yang bersimpati akan kasus yang diadvokasikan, memiliki reputasi yang dapat dipercaya dimata jurnalis, dan yang terakhir adalah mampu mengemas informasi secara tepat waktu dan dramatis.

Untuk syarat yang pertama, EJF memiliki keterkaitan dengan wartawan The Guardian, Kate Hondal dan Chris Kelly, keduanya memiliki afiliasi dengan organisasi Humanity United yang merupakan mitra dari EJF. Karenanya, menyusul investigasi EJF yang berjudul “*Sold to the Sea*” mengenai pelanggaran HAM di sektor perikanan Thailand, The Guardian menerbitkan sebuah paparan tentang perbudakan modern yang terjadi di industri *seafood* lukratif Thailand pada edisi 11 Juni 2014 dan ditampilkan pada halaman pertama. Costanza-Chock dan Rey-Mazón (2016) menyatakan apabila suatu isu dipublikasikan dalam halaman depan surat kabar internasional, hal ini mengindikasikan adanya upaya pembingkain opini oleh penulis dan editor. Selain itu halaman depan surat kabar ibarat ruang politik yang diperebutkan sebab memberikan ‘lensa’ secara langsung kepada pembaca. Upaya pembingkain lebih lanjut akan dibahas dalam politik simbolik.

Politik Simbolik

Politik simbolik adalah upaya pembingkain isu dengan bahasa yang lebih umum dan populer sehingga dapat dipahami oleh publik secara luas, tujuannya adalah untuk menarik banyak pihak agar mendukung posisi aktor jaringan advokasi transnasional dalam upaya advokasi mereka. Pembingkain seringkali menggunakan taktik *naming and shaming*. Menurut J.Franklin (2015), *naming and shaming* merupakan upaya pengumpulan dan diseminasi bukti pelanggaran HAM yang dilakukan oleh suatu entitas (biasanya negara) dengan tujuan mempermalukan entitas tersebut agar patuh terhadap instrumen HAM internasional. Dalam *naming and shaming*, kelompok advokasi telah memberikan label pada aktor target untuk memberikan ‘makna’ pada masyarakat luas bahwa aktor targetlah yang bertanggung jawab atas terjadinya praktik perbudakan modern yang menimpa pekerja di kapal-kapal penangkap ikan Thailand. Contoh dari penggunaan *naming and shaming* yang dilakukan oleh EJF terdapat dalam pernyataan Steve Trent selaku Direktur Eksekutif dari EJF: “*We have been genuinely surprised by the levels of collusion by agents of the state, who instead of stopping these awful human rights abuses are ignoring and even benefiting from it*” (The Guardian, 2013). Dari pernyataan Steve Trent tersebut, EJF sebagai organisasi yang dipimpinnya ingin menegaskan bahwa negara seharusnya bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi dalam wilayah yurisdikinya dan bukan malah mengabaikan atau membiarkan hal tersebut terjadi.

Framing perlu dilakukan untuk meyakinkan aktor target, media internasional, dan aktor berpengaruh lainnya bahwa dengan terlibat dalam aksi kolektif akan dapat membawa perubahan yang lebih baik, Benford dan Snow (2000) mengistilahkannya dengan “*call to*

arms”. Untuk dapat memotivasi aktor-aktor lainnya, aktor jejaring menggunakan perbendaharaan kata yang memiliki salah satu dari empat karakteristik seperti *severity*, *efficacy*, *urgency*, dan *propriety*. Menurut Benford dan Snow (2000), keempat kosakata tersebut memiliki kemampuan untuk dapat meyakinkan para pengikutnya maupun aktor lainnya untuk dapat terlibat dalam aksi kolektif. Upaya pembingkaihan isu agar memiliki elemen *severity* atau kekejaman dilakukan dengan mengekspos cerita para penyintas yang ditampilkan dengan penggunaan bahasa yang emosional (Mende, 2019). Dalam laman depan situs resminya, EJF menampilkan pernyataan dari para penyintas korban perbudakan modern di industri perikanan Thailand, salah satunya dari Yu Win yang menyatakan “*I want to tell [consumers] about our troubles. We sacrificed our blood, sweat and energy. I really would like to let them know about our nightmares*” (selengkapnya lihat EJF, 2013b, 2013a, 2014, 2015d, 2015c). Pemberian ruang publikasi terhadap cerita-cerita horor yang menimpa pekerja di sektor perikanan Thailand digunakan untuk menjustifikasi penggunaan label perbudakan dan untuk memancing reaksi keras dan memunculkan elemen *urgency* dari komunitas internasional (Vandergeest et al., 2017).

Pemilihan penggunaan istilah perbudakan modern untuk menggambarkan praktik eksploitasi yang dialami oleh pekerja-pekerja di kapal penangkap ikan Thailand merupakan strategi yang cerdas yang dilakukan oleh EJF untuk menarik perhatian internasional. Hal ini diamini oleh Marschke & Vandergeest (2016) dengan menyatakan “*The slavery and trafficking framings pervading these depictions have been very useful for drawing attention*”. Padahal apa yang terjadi di Thailand juga dapat digambarkan dengan menggunakan istilah kerja paksa, *unfree labor*, *indecent working conditions*, maupun perdagangan manusia (Marschke & Vandergeest, 2016; Mende, 2019). Salah satu raksasa media internasional yang turut ambil bagian dalam upaya resonansi yaitu The Guardian mengatakan kata perbudakan jauh lebih kuat dibandingkan dengan istilah kerja paksa atau *forced labor*, buktinya kata tersebut dapat secara cepat ‘memprovokasi’ pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasokan untuk merespon kasus perbudakan modern di industri perikanan Thailand (Vandergeest et al., 2017). Kemampuan untuk meromantisasi kesedihan merupakan aspek penting dalam menarik aktor-aktor lainnya, terutama aktor yang lebih kuat. Hal ini berakitan dengan politik pengaruh.

Politik pengaruh

Politik pengaruh merupakan kemampuan untuk menyerukan kepada aktor yang lebih kuat seperti pemerintah negara lain, organisasi internasional, maupun perusahaan multinasional, untuk dapat mempengaruhi situasi tertentu ketika salah satu anggota jaringan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh secara signifikan. Keck dan Sikkink (1999) membagi politik pengaruh menjadi dua yaitu pengaruh dari segi material dan dari segi moral. Dalam pengaruh material, aktor jaringan advokasi transnasional melobi negara atau institusi yang sedang melakukan kegiatan ekonomi (dapat berupa perdagangan maupun donor) dengan negara target agar bersedia untuk menghentikan kegiatan tersebut.

Dari segi material, politik pengaruh dilakukan EJF dengan secara kontinu melakukan presentasi hasil investigasi kepada *US Department of State*, *European Commission* dan *European Parliament* (Huffingtonpost, 2017). Tujuannya tidak lain adalah mengubah kebijakan Amerika Serikat dan Uni Eropa sebagai aktor (negara) yang memiliki kekuatan untuk menjatuhkan ‘hukuman’ bagi pemerintah Thailand. Terlibatnya aktor-aktor yang lebih kuat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa yang merupakan mitra dagang terbesar produk *seafood* Thailand tentunya akan memiliki dampak terhadap efektivitas politik kampanye

yang dilakukan oleh EJF.

Politik pengaruh selanjutnya bersifat moral. Pengaruh sisi ini berkaitan dengan kemampuan aktor jaringan advokasi transnasional melakukan *lobbying* kepada negara-negara yang dikenal menghormati keberadaan HAM, tujuannya untuk turut mendukung kelompok advokasi dalam memermalukan aktor target agar menjadi sorotan komunitas internasional. Dengan berada di bawah *spotlight* internasional, aktor target diharapkan dapat mengubah perilaku atau kebijakannya. Keck dan Sikkink (1998, hal. 31) menyebutnya sebagai '*mobilization of shame*'. Mobilisasi rasa malu ini cenderung memunculkan *mobilization of outrage*. Dinamakan *outrage* atau kemarahan karena memicu tindakan para aktivis HAM dan kadang-kadang individu biasa tanpa latar belakang pengalaman advokasi untuk mengecam dan menyerukan pemberian hukuman bagi pelanggar. Penelitian sebelumnya (lihat John & Klein, 2003; Brinkmann, 2004; Lindenmeier, Schleer, & Priel, 2012; Shim, Cho, Kim, & Yeo, 2018)) menunjukkan bahwa konsumen semakin sadar akan tanggung jawab moral yang mereka miliki, karenanya mereka tidak ragu untuk melakukan tekanan kolektif seperti mengadvokasi aksi boikot ketika mereka menganggap bahwa standar moral mereka bertentangan dengan etika dan tindakan bisnis suatu perusahaan. Salah satu aksi boikot diserukan oleh Chris Smith, salah satu anggota Kongres Amerika Serikat yang menyatakan, "*All of us may find ourselves eating a slave-made product without knowing it, but once we know it, we all have a moral obligation, I believe, to make a personal decision to boycott it*" (BBC, 2015).

Politik akuntabilitas

Menurut Keck dan Sikkink (1999), politik akuntabilitas perlu dijalankan oleh kelompok jejaring sebab terdapat adegium yang mengatakan bahwa '*talk is cheap*', artinya negara yang menjadi aktor target bisa saja mengubah posisi diskursus untuk mengalihkan perhatian publik dan tentunya kelompok jejaring advokasi transnasional. Dalam menjalankan politik akuntabilitas ini, EJF mendorong pemerintah Thailand untuk menandatangani *Work in Fishing Convention 2007* sebagai bukti nyata bahwa Thailand memiliki komitmen untuk memperbaiki sektor perikananannya sehingga terbebas dari praktik perbudakan modern. Hasilnya pemerintah Thailand meratifikasi *Work in Fishing Convention* pada 30 Januari 2019. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, jaringan dapat melakukan pemantuan yang terukur terkait implementasi kewajiban Thailand yang timbul dari peratifikasian Konvensi terkait.

Politik akuntabilitas yang dilakukan oleh EJF juga diwujudkan melalui "*The Ten Principles for Global Transparency*" pada tahun 2018. Adanya 10 prinsip transparansi global ini akan menjadikan rantai pasokan *seafood* global lebih terbuka dan transparan sehingga pengawasan terhadap implementasi penghapusan praktik perbudakan modern di industri perikanan Thailand akan mudah dilakukan. Selain itu, EJF setiap tahunnya (terhitung sejak 2014) juga rutin mempublikasikan status implementasi rekomendasi EJF terhadap aktor target yaitu Thailand. Status implementasi yang terakhir dikeluarkan pada tahun 2019 dengan judul "*Implementation Status of EJF Recommendation to the Royal Thai Government* (EJF, 2019).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari tulisan ini adalah kampanye *Seafood not Slavefood* yang digagas oleh EJF untuk menghentikan praktik perbudakan modern di industri perikanan Thailand dapat dikatakan berhasil. Hal ini dibuktikan dengan kesediaan pemerintah Thailand untuk

meratifikasi *ILO Work in Fishing Convention* dan *Protocol amending Forced Labor Convention*. Keberhasilan ini dikarenakan empat strategi utama yang dilakukan oleh EJF. Strategi pertama yaitu politik informasi melalui investigasi langsung ke lokus kejadian untuk mendapatkan data, fakta, dan testimoni dari korban praktik perbudakan modern, kemudian didesiminasikan melalui media internasional. Kedua, politik simbolik melalui pembingkaihan isu, seperti penggunaan perbendaharaan kata yang dapat membangkitkan aksi kolektif serta pemilihan istilah yang tepat agar mendapat atensi internasional. Ketiga, politik pengaruh untuk menarik dukungan dari aktor yang lebih kuat dengan melihat aspek material dan moral, kedua aspek tersebut dimiliki oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Terakhir, politik akuntabilitas yang diwujudkan melalui tindakan pengawasan. Perlu dipahami bahwa keempat strategi tersebut bukanlah proses linier yang bersifat evolutif, melainkan serangkaian strategi yang bersifat adaptif dan komplementer.

REFERENSI

- BBC. (2015, Desember 15). *Calls mount for boycott of Thai shrimp imports after slave labour report*. Diakses pada 16 Oktober 2019, dari <https://www.bbc.com/news/business-35106683>
- Bush, S. R., Marschke, M., & Belton, B. (2018). Labor, Social, Sustainability and the Underlying Vulnerabilities of Work in Southeast Asia's Seafood Value Chains. In M. Andrew, L. Law, & F. Miller (Eds.), *Routledge handbook of Southeast Asian history* (Vol. 51, pp. 316–329). New York: Taylor & Francis. <https://doi.org/10.5860/choice.51-5174>
- Costanza-Chock, S., & Rey-Mazón, P. (2016). PageOneX: New approaches to newspaper front page analysis. *International Journal of Communication*, 10, 2318–2345.
- EJF. (2013a). *Human Trafficking in Thailand's Fishing Industry*. London.
- _____. (2013b). *Sold to the Sea: Human Trafficking in Thailand's Fishing Industry*. London.
- _____. (2013c). *The Hidden Cost: Human Rights Abuses in Thailand's Shrimp Industry*. London.
- _____. (2014). *Slavery at Sea - The Continued Plight of Trafficked Migrants*. London.
- _____. (2015a). *Brokern Promises: Why Thailand should stay on Tier 3 in the 2015 US Trafficking in Persons Report*.
- _____. (2015b). *Pirates and Slaves: How Overfishing in Thailand Fuels Human Trafficking and the Plundering of Our Oceans*. London. Retrieved from www.ejfoundation.org
- _____. (2015c). *Thailand's Seafood Slaves: Human Trafficking, Slavery and Murder in Kantang's Fishing Industry*. London.
- _____. (2015d). *Thailand Seafood Slave. Human Trafficking, Slavery and Murder in Kantang's Fishing Industry*.
- _____. (2016). *IMPACT REPORT 2016*. London.
- _____. (2019). *Implementation Status of EJF Recommendations to the Royal Thai Government*. London. Retrieved from <https://ejfoundation.org/resources/downloads/RTG-policy-recommendations-progress-spring-2019.pdf>
- _____. (2018a, Oktober 10). *Thailand's Commitment to Eradicating Abuses in Fisheries Must be Clear and Firm*. Diakses pada 06 Oktober 2019, dari <https://ejfoundation.org/news-media/2018/thailands-commitment-to-eradicating-abuses-in-fisheries-must-be-clear-and-firm>
- _____. (2018b, September 19). *Royal Thai Government Commits to Adopting Vital Labour Laws to Tackle Illegal Fishing and Associated Human Rights Abuses*. Diakses pada 06 Oktober 2019, dari <https://ejfoundation.org/news-media/2018/thai-government-gives-commitment-to-ratify-ilo-convention-c188-in-2018-as-next-measure-to-eradicated-illegal-fishing-and-associated-human-rights-abuses>
- Freedom House. (2013). *Thailand*. Diakses pada 04 Oktober 2019, dari

- <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/thailand>. (2015). *Thailand*. Diakses pada 04 Oktober 2019, dari <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/thailand>
- Human Rights Watch. (2018). *Hidden Chains: Rights Abuses and Forced Labor in Thailand's Fishing Industry*. Retrieved from https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/thailand0118_report_web.pdf%0Ahttps://www.hrw.org/report/2018/01/23/hidden-chains/rights-abuses-and-forced-labor-thailands-fishing-industry
- Huffingtonpost. (2017). *Steve Trent*. Diakses pada 05 Oktober 2019, dari https://www.huffingtonpost.co.uk/author/steve-trent/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAF2e9NCHIpbBP8FENCsNYd-d7hBc6tkS-TURbMw4MRw09MFiPHvfjT6UFcK4ISWCjpSp5-KjK30BaYhrJkmIMUTQAZzq7D6JxFN0QX6hH69zMDjGA3POZWW7ie
- Keck, M., & Sikkink, K. (1998). *Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Cornell University Press.
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1999). Transnational advocacy networks in international and regional politics. *International Social Science Journal*, 51(159), 89–101. <https://doi.org/10.1111/1468-2451.00179>
- LPN. (2019). *Team*. Diakses pada 04 Oktober 2019, dari <https://www.lpnfoundation.org/team>
- Marschke, M., & Vandergeest, P. (2016). Slavery scandals: Unpacking labour challenges and policy responses within the off-shore fisheries sector. *Marine Policy*, 68, 39–46. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2016.02.009>
- Mende, J. (2019). The Concept of Modern Slavery: Definition, Critique, and the Human Rights Frame. *Human Rights Review*, 20(2), 229–248. <https://doi.org/10.1007/s12142-018-0538-y>
- Maritime Executive. (2018, November 02). *Slavery Still Persists in Thai Fisheries*. Diakses pada 13 Agustus 2019, dari <https://www.maritime-executive.com/editorials/slavery-still-persists-in-thai-fisheries>
- Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand. (2018). *Press Release : Thailand's Ratification of Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention 1930*. Diakses pada 13 September 2019, dari <http://www.mfa.go.th/main/en/news3/6886/90312-Thailand%E2%80%99s-Ratification-of-Protocol-of-2014-to-the.htm>
- _____. (2019, Februari 13). *Press Release : Thailand Ratifies ILO's Work in Fishing Convention No. 188, 2007 (C188)*. Diakses pada 06 Oktober 2019, dari <http://www.mfa.go.th/main/en/news3/6886/99718-Thailand-Ratifies-ILO%E2%80%99s-Work-in-Fishing-Convention.html>
- Murdie, A. (2014). The ties that bind: A network analysis of human rights international nongovernmental organizations. *British Journal of Political Science*, 44(1), 1–27. <https://doi.org/10.1017/S0007123412000683>
- Newton, K., & Van Deth, J. W. (2009). *Foundation of Comparative Politics: Democracies of the Modern World* (Second). New York: Cambridge University Press.
- Risse, T., Ropp, S. C., & Sikkink, K. (1999). *International Norms and Domestic Change* (First). New York: Cambridge University Press. Retrieved from [papers3://publication/uuid/B11D07A3-0129-4526-838C-1BE17CD22A58](https://publication/uuid/B11D07A3-0129-4526-838C-1BE17CD22A58)
- Shim, K., Cho, H., Kim, S., & Yeo, S. L. (2018). Impact of Moral Ethics on Consumers' Boycott Intentions: A Cross-Cultural Study of Crisis Perceptions and Responses in the United States, South Korea, and Singapore. *Communication Research*. <https://doi.org/10.1177/0093650218793565>
- Stringer, C., Chantavanich, S., Laodumrongchai, S., & Stringer, C. (2018). Under the shadow :

- Forced labour among sea fishers in Thailand Under the shadow : Forced labour among sea fishers in Thailand. *Marine Policy*, 68(June 2016), 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2015.12.015>
- The Guardian. (2013, Mei 29). *Thailand Ignoring Slaves at Sea*, says EJF report on Burmese migrants. Diakses pada 15 Oktober 2019, dari <https://www.theguardian.com/global-development/2013/may/29/thailand-slaves-sea-burmese-migrants>
- U.S. Department of Agriculture. (2018). Seafood Report. Diakses pada 15 Oktober 2019, dari [https://gain.fas.usda.gov/Recent GAIN Publications/Seafood Report_Bangkok_Thailand_5-8-2018.pdf](https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Seafood%20Report_Bangkok_Thailand_5-8-2018.pdf)
- Vandergeest, P., Tran, O., & Marschke, M. (2017). Modern day slavery in Thai fisheries: academic critique, practical action. *Critical Asian Studies*, 49(3), 461–464. <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1339465>
- Wright, J. (2019, Juni 12). *SeaWeb Seafood Summit in Thailand highlights rise of worker voice*. Diakses pada 03 Oktober 2019, dari Global Aquaculture Alliance: <https://www.aquaculturealliance.org/advocate/seaweb-seafood-summit-in-thailand-highlights-rise-of-worker-voice/>